



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Fachry Ali Firdaus
Dwimo Gogy Prabowo

Peran PPATK dalam Penanganan Kejahatan Penipuan Investasi

Isu Strategis

Pasca krisis multidimensi tahun 1998 yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi -13.1%, perekonomian Indonesia secara bertahap pulih dan konsisten mencatatkan pertumbuhan dengan rerata 4.7% dalam 24 tahun terakhir (The World Bank, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang konsisten tersebut menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi yang juga tergambar dari peningkatan Produk Domestik Bruto dari 373.53 milyar dolar AS di tahun 1998 menjadi 1.07 triliun dolar AS di tahun 2022 atau meningkat hampir 3 kali lipat (The World Bank, 2023). Peningkatan PDB juga tentunya disertai dengan kenaikan ukuran kesejahteraan individu yaitu pendapatan per kapita, dari 459.2 dolar AS di 1998 menjadi 4,332 dolar AS di tahun 2021, atau naik hampir 10 kali lipat. Kenaikan pendapatan individu tersebut jika menggunakan indikator pendapatan perkapita, tentunya akan mendorong tingkat konsumsi serta tingkat tabungan (savings) (A.P., Thirlwal, 1974). Di Bulan Desember 2022, tingkat tabungan bruto Indonesia berada di level 37.3% dan dalam 12 tahun terakhir berada di level rerata 34.8% (CEIC, 2023). Di tingkat individu, tingkat tabungan di bulan Januari 2023 berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia adalah sebesar 16.7% (Bank Indonesia, 2023).

Peningkatan taraf pendapatan yang diiringi tingkat tabungan sayangnya belum diimbangi dengan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk keuangan yang biasa disebut sebagai literasi keuangan. Pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan di Indonesia secara nasional ada di level 49.68%. Hal ini cukup berbeda dengan tingkat inklusi keuangan yang mencapai 85.1%, yang menandakan bahwa hanya 60% dari pengguna produk keuangan yang paham tentang produk keuangan yang baik dan aman. Di tingkat ASEAN, tingkat literasi keuangan Indonesia juga lebih rendah dibandingkan negara dengan komposisi penduduk dan tingkat ekonomi yang sejenis seperti Thailand yang mencapai 62.9% (The Nation Thailand, 2023). Masih terbatasnya jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan tentunya akan berdampak pada kesejahteraan individu (Yushita, 2017) karena keputusan yang diambil dalam mengelola dan menggunakan uang tidak berdasarkan informasi yang benar (uninformed decision). Kurangnya literasi keuangan juga membuat orang atau kelompok tersebut rentan terhadap aksi penipuan dan penyalahgunaan serta terdapat korelasi dengan kegagalan membayar kewajiban (default) dan perilaku peminjam lainnya yang dapat mendorong kerentanan keuangan (financial fragility) (Askar, Uttara, & Zhang, 2020).

2022

Komisi III

Pembahasan

Berdasarkan data yang dirilis Satgas Waspada Investasi (SWI), di tahun 2022 saja terdapat 106 pelaku investasi ilegal dan 698 pelaku usaha pinjaman daring ilegal (pinjol) yang dihentikan usahanya dengan kerugian mencapai Rp106 triliun rupiah (Malik, 2023). Nilai kerugian investasi tersebut terbilang fantastis, dan menjadi yang terbesar sejak 2011. Total kerugian akibat penipuan investasi sejak 2011 mencapai 209.16 triliun rupiah sebagaimana grafik di bawah. Kerugian tersebut tentunya sangat berdampak bagi para korban dan keluarga. Pada kasus gagal bayar salah satu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang ramai akhir ini, selain menderita kerugian secara finansial, dampak lain yang dirasakan korban menjadi bersifat multi dimensi, seperti anak korban yang terpaksa putus sekolah atau menunda kuliah, sanak saudara yang meninggal karena terlambat diobati, pertengkaran rumah tangga, hingga ada korban yang bunuh diri. Multidimensionalnya dampak kerugian yang tercipta dari kejahatan penipuan investasi menjadi salah satu alasan kuat bagi pemerintah untuk hadir dan melindungi para korban maupun calon korban. Berbagai Kementerian dan Lembaga terlibat baik dalam pencegahan maupun penanganan penipuan kejahatan investasi, diantaranya dalam Satgas Waspada Investasi (SWI).



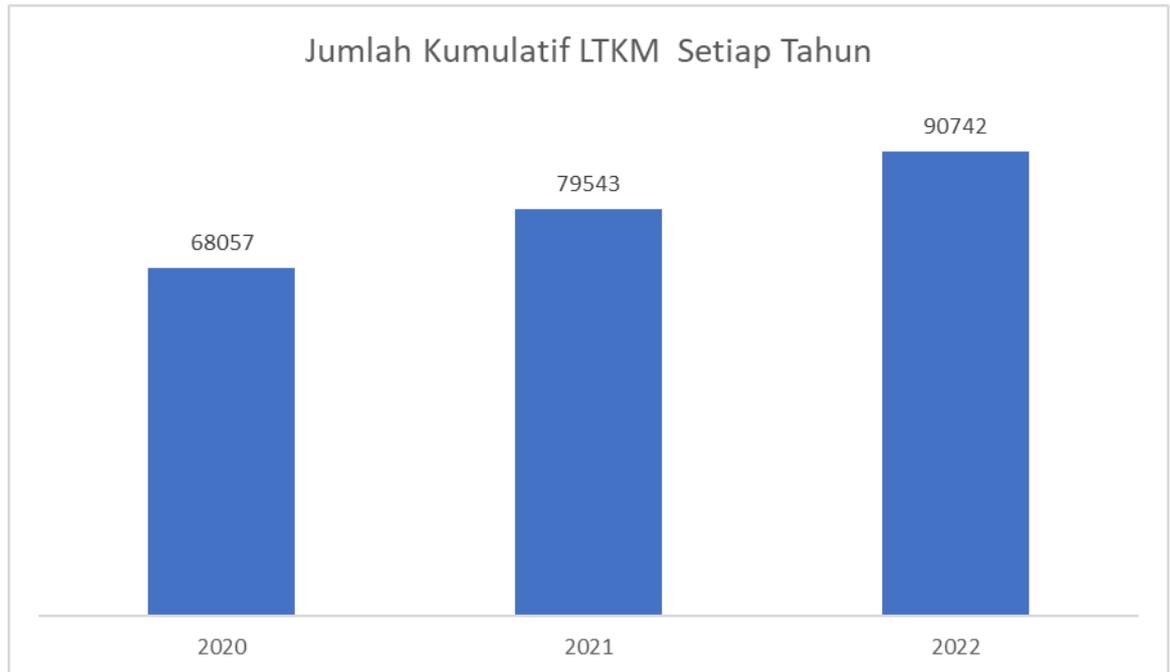
Sumber: Satgas Waspada Investasi & Kompas

Satgas Waspada Investasi (SWI) didirikan pada tahun 2007 untuk mempermudah koordinasi antar Kementerian/Lembaga pada kegiatan investasi serta penghimpunan dana masyarakat. Saat ini terdapat 12 anggota, diantaranya OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kominfo, Kemendagri, Kemenkop UKM, Kementerian Agama, Kemendikbud, Kepolisian, Kementerian Investasi/BKPM, dan PPAATK. SWI secara umum memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pencegahan meliputi edukasi & sosialisasi, dan pemantauan potensi tindakan melawan hukum. Kemudian pada fungsi kedua, SWI memiliki fungsi penanganan meliputi inventarisasi kasus, analisis kasus, pengentian dan penghambatan tren kegiatan penghimpunan dana yang berpotensi melawan hukum, penelusuran situs yang menjadi sarana kegiatan penghimpunan dana dan investasi melawan hukum, hingga penyusunan rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum. SWI berperan aktif setiap tahunnya dalam melaksanakan kedua fungsi tersebut. Pada Januari 2023 saja SWI telah menemukan 10 pelaku usaha yang melakukan penawaran investasi tanpa izin (Respati, 2023). Sebagai salah satu anggota SWI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

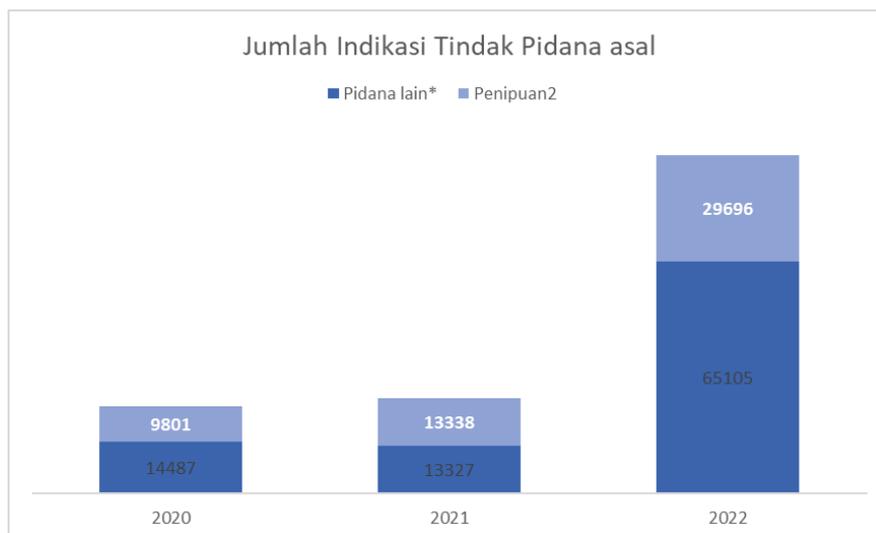
(PPATK) memiliki peran penting baik dalam fungsi pencegahan dan penanganan dugaan tindak pidana investasi ilegal dalam struktur SWI. Terdapat korelasi antara kegiatan penipuan investasi/ investasi bodong dengan kegiatan pencucian uang hasil kegiatan penipuan investasi tersebut (Yahya, 2022).

PPATK yang didirikan pada tahun 2002 memiliki fungsi utama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana pedanaan terorisme. Berdasarkan Laporan Kinerja 2021, PPATK memiliki pagu anggaran sebesar Rp181.783.991.000,00 yang Rp50.135.461.000,00 diantaranya dialokasikan untuk program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pada periode Januari – Desember 2022, PPATK menerima 27.81 juta laporan dan menghasilkan 895 hasil analisis. Jumlah laporan tersebut meningkat 12.1% dari periode yang sama di 2021, sedangkan jumlah hasil analisis meningkat 25.2%.



Sumber: Buletin Statistik PPATK Desember 2022



Sumber: Buletin Statistik PPATK Desember 2022

Dari jumlah laporan tersebut, 90,742 diantaranya merupakan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Jumlah tersebut naik 14.0% dibandingkan periode tahun 2021 (PPATK, 2022). Dalam 3 tahun terakhir tercatat jumlah LTKM terus meningkat dengan pertumbuhan dua digit. Jika dianalisis lebih

lanjut berdasarkan jenis tindak pidana asal, jenis tindak pidana (TP) penipuan

menjadi yang terbanyak setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2021 TP penipuan naik 36% dan di tahun 2022 naik 122.6%. Kenaikan tersebut sejalan dengan tren kenaikan kerugian akibat penipuan investasi di 2022 yang mencatatkan rekor.

Selain menerima dan menganalisis laporan transaksi keuangan, dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan menghentikan sementara transaksi selama 20 hari kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi kepada penegak hukum terhadap transaksi yang mencurigakan yang berasal dari investasi bodong. Dalam menjalankan fungsinya PPATK juga bekerjasama dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain. Di tahun 2022 hingga bulan April, PPATK telah berhasil menghentikan sementara transaksi yang diduga berasal dari kegiatan investasi ilegal senilai Rp588 milyar dari 345 rekening (PPATK, 2022).

Kesimpulan

Makin maraknya kejahatan investasi yang dilakukan lembaga penghimpun dana dan penawaran investasi tidak berizin semakin banyak memakan korban dengan nilai kerugian semakin besar hingga mencatat rekor di tahun 2022. Masih rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab dan pekerjaan rumah instansi terkait. PPATK selaku salah satu anggota SWI dan sebagai lembaga dengan kewenangan analisis transaksi keuangan dapat mengoptimalkan perannya selain berdasarkan permintaan (inquiry), PPATK juga dapat meningkatkan peran proaktifnya dalam memberikan peringatan (early warning) Ketika menemukan lembaga keuangan dengan skala besar yang dapat berdampak besar dan sistemik jika terjadi. Komisi III dalam hal ini selaku mitra PPATK dapat mendukung dengan mendukung peningkatan peran PPATK serta meningkatkan koordinasi dengan Komisi mitra Kementerian/Lembaga lainnya yang terlibat dalam Satgas Waspada Investasi.

Referensi

- A.P., Thirlwal. (1974). Per Capita Income, the Growth of Income and the Savings Ratio. In *Inflation, Saving and Growth in Developing Economies*. London: Palgrave.
- Askar, M. W., Uttara, B., & Zhang, Y.-F. (2020). Financial Literacy and Poverty Reduction: The Case of Indonesia. *ADB Institute Working Paper Series*.
- Bank Indonesia. (2023). *Survei Konsumen*. Bank Indonesia.
- CEIC. (2023). *Indonesia Tabungan Bruto*. Retrieved from CEIC Data: <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/gross-savings-rate>
- Freeman, M., & Ruehsen, M. (2013). Terrorism Financing Methods: An Overview. *Perspectives on Terrorism*, 5-26.
- Malik, A. (2023, Januari 02). *SWI Stop 895 Investasi, Pinjol dan Gadai Ilegal di 2022, Ini Modus Barunya*. Retrieved from Bareksa: <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2023-01-02/swi-stop-895-investasi-pinjol-dan-gadai-ilegal-di-2022-ini-modus-barunya>
- PPATK. (2022). *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan pendanaan Terorisme (APUPPT)*. PPATK.
- PPATK. (2022, April 15). *OPTIMALISASI PENGEMBALIAN ASET & KEUANGAN NEGARA : PPATK Perkuat Analisis & Pemeriksaan Transaksi Keuangan*. Retrieved from PPATK: https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1188/optimalisasi-pengembalian-aset-keuangan-negara-ppatk-perkuat-analisis-pemeriksaan-transaksi-keuangan.html#:~:text=MENELUSURI%20INVESTASI%20ILEGAL&text=PPATK%20memiliki%20kewenangan%20dalam%20melakukan,diduga%2
- Prasetya, A. Y., Subroto, A., & Nurish, A. (2021). Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency. *Journal of Terrorism Studies*.
- Respati, A. R. (2023, 02 02). *Satgas Waspada Investasi Temukan 10 Investasi Ilegal, dari Kripto sampai Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Retrieved from Kompas.com:

<https://money.kompas.com/read/2023/02/02/150000826/satgas-waspada-investasi-temukan-10-investasi-ilegal-dari-kripto-sampai?page=all>

The Nation Thailand. (2023, February 14). *More Thais Getting Smarter With Their Money, BOT Survey shows*. Retrieved from The Nation Thailand:
<https://www.nationthailand.com/business/40008144>

The World Bank. (2023). *GDP (constant 2015 US\$) - Indonesia*. Retrieved from The World Bank Data: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=ID>

The World Bank. (2023). *GDP growth (annual %) - Indonesia*. Retrieved from The World Bank Data: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID>

Yahya, A. N. (2022, 03 11). *Ironi Pelaku Penipuan Investasi Bodong: Tipu dan Cuci Uang demi Kemewahan*. Retrieved from Kompas.com:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/09562791/ironi-pelaku-penipuan-investasi-bodong-tipu-dan-cuci-uang-demi-kemewahan>

Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Pribadi. *Journal Nominal*.

2022

Komisi III